

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### A.a Eksternalitas

###### A.a.1 Pengertian Eksternalitas

Berbagai pendapat mengemukakan teorinya tentang pengertian eksternalitas. Pendapat oleh Rosen (1988) menyatakan bahwa eksternalitas terjadi ketika aktivitas suatu satu kesatuan mempengaruhi kesejahteraan kesatuan yang lain yang terjadi diluar mekanisme pasar (*non market mechanism*). Tidak seperti pengaruh yang ditransmisikan melalui mekanisme harga pasar, eksternalitas dapat mempengaruhi efisiensi ekonomi.

Fisher (1996) mengatakan bahwa eksternalitas terjadi bila satu aktivitas pelaku ekonomi (baik produksi maupun konsumsi) mempengaruhi kesejahteraan pelaku ekonomi lain dan peristiwa yang ada terjadi di luar mekanisme pasar. Sehingga ketika terjadi eksternalitas, maka *privat choice* oleh konsumen dan produsen dalam *private markets* umumnya tidak menghasilkan sesuatu yang secara ekonomi efisien.

Berdasarkan pada pemahaman di atas dapat dijelaskan bahwa dalam perspektif teoritis. Eksternalitas terjadi karena adanya perbedaan antara *marginal sosial* dan *private cost* suatu barang. Dalam kasus kerusakan lingkungan menimbulkan *negative externality* karena tidak adanya unsur

biaya tambahan dalam bentuk *social cost* yang masuk dalam komponen harga barang akhir. Oleh karena itu diperlukan *government intervention* dalam bentuk penetapan pajak atau subsidi guna mengoreksi dampak-dampak dari eksternalitas (Verhoef dan Nijkamp 2000) dalam Ansky (2010).

### **A.a.2 Bentuk-Bentuk Eksternalitas**

Eksternalitas dalam kenyataannya memiliki dua macam bentuk, yakni:

#### **1. Eksternalitas Negatif**

*Eksternalitas negative* (Biaya Eksternal) adalah biaya terhadap pihak ketiga selain pembeli dan penjual pada suatu macam barang yang tidak direfleksikan dalam harga pasar. Ketika terjadi eksternalitas yang negatif, harga barang atau jasa tidak menggambarkan biaya sosial tambahan (*marginal social cost*) secara sempurna pada sumber daya yang dialokasikan dalam produksi. Baik pembeli maupun penjual barang tidak memperhatikan biaya-biaya ini pada pihak ketiga.

#### **2. Eksternalitas Positif**

Eksternalitas positif adalah keuntungan terhadap pihak ketiga selain penjual atau pembeli barang atau jasa yang tidak direfleksikan dalam harga. Ketika terjadi eksternalitas positif maka harga tidak sama

dengan keuntungan sosial tambahan (*marginal cost benefit*) dari barang dan jasa yang ada.

Contoh dari eksternalitas positif ini adalah dengan adanya suntikan antibody terhadap suatu penyakit, maka suntikan tersebut selain bermanfaat bagi orang yang bersangkutan juga bermanfaat bagi orang lain yakni tidak tertular penyakit.

Menurut Harwick dan Olewifer (1998) mengatakan bahwa terdapat dua penggambaran eksternalitas, yakni :

- a.) Eksternalitas *Privat*, dan
- b.) Eksternalitas *Public*.

Selain itu eksternalitas juga terkait dalam efisiensi alokasi sumber daya alam. Hal ini sangat perlu peranan pemerintah dalam pengendalian eksternalitas. Melalui penetapan pajak pigovian, dan jika solusi yang diberikan swasta dalam mengatasi eksternalitas tidak berhasil pemerintah akan turun tangan dengan mengatasinya seperti kebijakan tentang regulasi pajak pigovian.

Jika dilihat dari para pelakunya, eksternalitas dapat dilihat sebagai:

1. Efek perbuatan satu produsen terhadap produsen lain (*effect of producers on other producers*).

Contohnya adalah nelayan dengan kapal-kapal besar akan mampu menjaring ikan dengan jumlah yang sangat banyak, akan tetapi produsen lain (dalam hal ini nelayan-nelayan kecil) akan

mengalami kesulitan mendapatkan ikan karena telah habis dijarah oleh nelayan pasar.

2. Efek perbuatan produsen terhadap konsumen (*effect of producers on consumers*).

Contohnya peternakan sapi ataupun ayam yang berada ditengah pemukiman. Orang-orang yang tinggal disekitar pemukiman mungkin akan merasa sangat terganggu dengan bau kotoran hawan-hewan ternak tersebut.

3. Efek perbuatan konsumen terhadap konsumen lain (*effect of consumer on consumer*).

Contohnya seseorang yang merokok di bus atau angkutan umum akan mengganggu penumpang lain yang berada di bus atau angkutan umum tersebut.

4. Efek perbuatan konsumen terhadap produsen (*effect of consumers on producers*).

### **A.a.3 Jenis – Jenis Eksternalitas**

Eksternalitas dibagi atas dua jenis yaitu :

1. *Technical externality* yaitu tindakan konsumsi produksi mempengaruhi tindakan konsumsi produksi orang lain tanpa kompensasi.

2. *Pecuniary externality* yaitu tindakan/ produksi yang lebih menekankan pada unsure harga dalam perekonomian yaitu kendala anggaran.

Jenis-jenis eksternalitas menurut Jhon F.Due dan Ann Fredlaender yaitu :

1. Eksternalitas konsumsi, terjadi apabila kemakmuran dari suatu orang dipengaruhi oleh pola-pola konsumsi orang lain.
2. Eksternalitas produksi terjadi apabila keluaran atau (*output*) suatu perusahaan juga bersifat sebagai masukan (*input*) bagi fungsi produksi perusahaan orang lain.
3. Eksternalitas keuangan timbulnya karena adanya ketergantungan dari hubungan-hubungan produksi yang terdapat di setiap perekonomian.
4. Eksternalitas teknologi terjadi apabila produsen dari suatu kegiatan tertentu tidak dapat membuat semua keuntungan menjadi kenyataan atau tidak dipaksakan untuk memikul semua biaya yang ditimbulkan akibat dari kegiatan yang diderita oleh perusahaan-perusahaan lain atau anggota-anggota masyarakat, sehingga timbul keuntungan atau kerugian eksternal.

#### **A.a.4 Kebijakan Untuk Mengatasi Eksternalitas**

1. Solusi dalam mengatasi polusi

Tentunya dalam melakukan proses produksi, dihasilkan pula sisa pembuangan yang berbentuk cair, padat gas. Perusahaan dapat membayar pajak polusi sebesar polusi yang dikeluarkan. Pengenaan pajak tersebut dapat dikatakan mampu menciptakan internalisasi eksternalitas.

2. *Tradeobel Emmisions Permit*

Dapat dilakukan perusahaan terkait dengan mengurangi jumlah populasi yang ditimbulkan dari pada harus membayar pajak yang mahal.

3. *Proverty Right*

Dalam Coase Theorem menyatakan bahwa penerapan *proverty right* akan mengarahkan pada solusi optimal, memperhatikan siapa yang menerimanya, jika *transaction cost* kecil dan jumlah yang bernegosiasi terbatas. Contohnya, masyarakat disekitar pabrik atau daerah pertambangan, berhak mendapat udara bersih, ketenangan, air bersih. Oleh karena itu perusahaan harus membayar biaya untuk masyarakat yang terkena dampak polusi.

#### 4. Sarana dan Prasarana

Misalnya berupa jembatan penyebrangan, jalan raya, rel kereta api, dan sarana public lainnya. Sehingga keberadaan perusahaan dirasakan manfaat bagi warga sekitarnya. Ini juga merupakan salah satu tanggung jawab perusahaan dan limpahan manfaat dari adanya teknologi yang dibuat.

### **A.b UKM**

#### **A.b.1 Kondisi Umum UKM di Negara-Negara Berkembang**

Karakteristik yang melekat pada UKM bisa merupakan kelebihan atau kekuatan yang justru menjadi penghambat perkembangannya (*growth constraints*). Kombinasi dari kekuatan dan kelemahan serta interaksi keduanya dengan situasi eksternal akan menentukan prospek perkembangan UKM.

**Tabel a.b.1**  
Analisis Kekuatan dan Kelemahan

Faktor-faktor	Kekuatan	Kelemahan
Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Motivasi yang kuat untuk mempertahankan usahanya</li> <li>2. Suplai tenaga kerja berlimpah dan upah murah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas SDM (terutama pendidikan formal) rendah, termasuk kemampuan melihat peluang bisnis terbatas</li> <li>2. Produktivitas rendah</li> <li>3. Etos kerja dan disiplin rendah</li> <li>4. Penggunaan tenaga kerja cenderung eksploitatif dengan tujuan untuk mengejar target</li> <li>5. Sering mengandalkan anggota keluarga sebagai pekerja tidak dibayar</li> </ol>
Ekonomi (Bisnis)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengandalkan sumber-sumber keuangan informal yang mudah diperoleh</li> <li>2. Mengandalkan bahan baku lokal (tergantung pada jenis produk yang dibuat)</li> <li>3. Melayani segmen pasar bawah yang tinggi permintaan (proporsi dari populasi paling besar)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai tambah yang diperoleh rendah, dan akumulasinya sulit terjadi</li> <li>2. Manajemen keuangan buruk</li> </ol>

Sumber : sebagian dari Tabel 3 di Sjaifudian dkk (1995)

Secara ringkas analisis terhadap kekuatan dan kelemahan UKM yang berkaitan dengan sumber daya (manusia dan ekonomi) diuraikan dalam table a.1



Kombinasi antara kekuatan dan kelemahan tersebut sangat menentukan kemampuan UKM dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Tantangan-tantangan yang dihadapi UKM di manapun juga saat ini dan yang akan datang adalah terutama dalam aspek-aspek berikut ini:

- a. Perkembangan teknologi yang pesat: perubahan teknologi mempengaruhi ekonomi atau dunia usaha, dari dua sisi yakni sisi penawaran dan sisi permintaan. Dari sisi penawaran, perkembangan teknologi mempengaruhi antara lain metode atau pola produksi, komposisi serta jenis material/*input* dan bentuk serta kualitas produk yang dibuat. Sedangkan, dari sisi permintaan perubahan teknologi membuat pola permintaan berbeda, yang pada awal periode setelah perubahan tersebut lebih banyak berasal dari perusahaan atau industri. Sedangkan permintaan masyarakat, setelah mereka diperkenalkan dengan produk-produk baru yang mengandung teknologi baru maka permintaan konsumen di pasar juga akan berubah. Jadi, berkaitan dengan ini, *survival capability* dari UKM sangat bergantung dari tingkat fleksibilitasnya dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian di segala bidang yang berkaitan dengan perubahan teknologi. Di sini, antara lain penguatan SDM sangat krusial.
- b. Persaingan semakin bebas: penerapan sistem pasar bebas dengan pola atau sistem persaingan yang berbeda dan intensitasnya yang

lebih tinggi, ditambah lagi dengan perubahan teknologi yang berlangsung terus dalam laju yang semakin cepat dan perubahan selera masyarakat yang terutama akibat pendapatan masyarakat yang terus meningkat, maka setiap pengusaha kecil dan menengah (juga besar) ditantang apakah mereka sanggup menghadapi/menyesuaikan usaha mereka dengan semua perubahan ini.

#### **A.b.2 Usaha Mikro dan Menengah**

##### **a. Pengertian UMKM**

Pengertian UKM berbeda di setiap negara, tergantung dari ukuran sosial ekonominya seperti jumlah karyawan, omset tahunan atau asset dan modal perusahaan. Di Australia, ABS mendefinisikan UKM sebagai perusahaan dengan staf antara 1 sampai 199; Uni Eropa sendiri mendefinisikan UKM sebagai perusahaan yang memiliki karyawan kurang < 250 dengan asset < 43.000.000 per tahun dan omzet tahunan < 50.000.000. Khaliq *et al* (2014) dalam Nita (2015)

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 yaitu :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kriteria UMKM dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2008 pasal 6 yaitu mengenai Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

- a. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- b. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
1. Memiliki kekayaan bersih  $>$  Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan  $>$  Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- c. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:
1. Memiliki kekayaan bersih  $>$  Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan  $>$  Rp 2.500.000.000,00 (dua juta lima ratus miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Contoh usaha mikro yakni:

- Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudi daya.
- Industri makanan, minuman, industry meubel pengolahan, kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat.
- Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar, dll
- Peternak ayam, itik, peternakan.
- Usaha kasar, seperti jasa perbengkelan, salon kecantikan, ojek, penjahit.

b. Karakteristik UMKM

Selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, kriteria usaha kecil adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 sebagai berikut:

- a. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

- b. Usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan-penjualan tahunan lebih besar dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.

Secara nominal kriteria dalam ketentuan tersebut memberikan batas Rp. 200.000.000 sebagai pembatas antara jumlah modal pengusaha kecil dan pengusaha besar serta pengusaha menengah.

### **A.b.3 Peran Penting UKM**

Peran penting UKM dalam perekonomian nasional memiliki peran antara lain :

1. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi
2. Penyedia lapangan kerja terbesar
3. Pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat
4. Pencipta pasar terbaru dan sumber inovasi
5. Kontribusinya terhadap neraca

(Departement Koperasi 2008)

Menurut Zuhul (2010) dalam Tirza dan Nita (2015) salah satu keunggulan UKM adalah terkadang sangat lincah mencari peluang untuk berinovasi dalam menerapkan teknologi baru ketimbang perusahaan-perusahaan besar yang telah mapan. Tidak mengherankan

jika era persaingan global saat ini banyak perusahaan besar yang tergantung pada pemasok-pemasok kecil menengah. Sesungguhnya ini peluang bagi pemilik usaha kecil menengah untuk ikut berkecimpung di era global sekaligus menggerakkan sektor ekonomi riil.

### **A.c. Jasa Pendidikan**

#### **A.c.1. Institusi Pendidikan sebagai Infrastruktur Perkotaan**

Suripin (2004) dalam John (2010) mengatakan bahwa Grigg mendefinisikan prasarana dan sarana infrastruktur sebagai fasilitas fisik suatu kota atau negara yang disebut prasarana umum.

Dalam buku laporan tentang *Capacity Building in Urban Infrastructure Management (CBUIM)*, Departement Permukiman dan Prasarana Wilayah mendefinisikan prasarana dan sarana sebagai berikut : “Prasarana dan sarana merupakan bangunan dasar yang sangat diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia yang hidup bersama-sama dalam suatu ruang yang terbatas agar manusia dapat bermukim dengan nyaman dan dapat bergerak dengan mudah dalam segala waktu dan cuaca, sehingga dapat hidup dengan sehat dan dapat berinteraksi satu dengan lainnya dalam mempertahankan kehidupannya” Suripin (2004) dalam John (2010)

Secara lebih lugas dapat dikatakan juga bahwa jika terdapat infrastruktur dalam perkotaan yang berada di dalamnya termasuk sarana dan prasarana pendidikan adalah bangunan atau fasilitas-fasilitas dasar,

peralatan-peralatan, dan instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk mendukung berfungsinya suatu sistem tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Infrastruktur merupakan asset fisik yang dirancang dalam sistem, sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam konteks ekonomi, infrastruktur pendidikan sebagai modal sosial masyarakat merupakan tempat bertumpu perkembangan ekonomi sebagai lembaga yang menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin tercapai tanpa ketersediaan infrastruktur yang memadai. Namun penting bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki kompatibilitas dengan kondisi sumberdaya alam dan sumber daya manusia di wilayah pengembangan, sehingga dilakukan penataan ruang agar terbentuk alokasi ruang yang menjamin kompatibilitas tersebut.

#### **A.c.2. Sektor Jasa Pendidikan dalam Pertumbuhan Ekonomi Wilayah**

Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan untuk jangka panjang naik. Kebijakan yang dijalankan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah melakukan industrialisasi dalam berbagai sektor sehingga dengan terciptanya industri tersebut, pertumbuhan ekonomi akan dapat dipacu setinggi mungkin. Ini akan



meningkatkan aktivitas perekonomian dalam masyarakat tersebut, Nasution (1997). Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya, atau perekonomian mengalami pertumbuhan apabila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.

Dalam perekonomian, masing-masing sektor tergantung pada sektor lainnya. Satu dengan lainnya saling memerlukan baik dalam tenaga kerja, bahan mentah maupun hasil pada akhirnya. Contohnya dalam sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, kemudian hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa lainnya. Demikian halnya dengan sektor jasa pendidikan yang hasilnya dibutuhkan oleh sektor-sektor lainnya dimana produknya adalah SDM berupa tenaga kerja terdidik, disisi lain sektor pendidikan juga membutuhkan sektor jasa lainnya yang mendukung proses pendidikan itu sendiri seperti jasa kursus, jasa internet, jasa penggandaan dan percetakan, jasa penyedia makanan dan minuman, jasa rumah, sewa-menyewa, dan lain-lain.

### **A.c.3. Peran Institusi Pendidikan Sebagai Sektor Penggerak Ekonomi**

Jasa pelayanan pendidikan skala regional merupakan pasar potensial bagi kegiatan sektor ekonomi lain yang terkait dengannya.

Peningkatan jumlah populasi sebagai akibat migrasi karena pendidikan berarti peningkatan akan permintaan barang-barang kebutuhan. Menurut Pappas dan Hirschey (1995) dalam John (2010) menyatakan bahwa permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang rela dan mampu dibeli oleh para pelanggan selama periode tertentu berdasarkan sekelompok kondisi tertentu. Dengan kata lain, permintaan adalah jumlah total yang rela dan mampu dibeli oleh para langganan. Kerangka waktu tersebut dapat satu jam, satu hari, satu tahun, atau periode lainnya. Kondisi-kondisi yang harus dipertimbangkan mencakup harga barang yang bersangkutan, harga dan ketersediaan barang yang berkaitan, perkiraan akan perubahan harga, pendapatan konsumen, selera dan preferensi konsumen, pengeluaran periklanan dan sebagainya. Jumlah produk yang siap dibeli oleh para konsumen, yaitu permintaan produk tersebut, bergantung pada semua faktor ini.

Untuk kegiatan ekonomi lainnya yang berorientasi pasar focus utamanya adalah pada permintaan pasar, tetapi permintaan pasar semata-mata merupakan gabungan dari permintaan individual atau pribadi, dan gagasan tentang hubungan permintaan pasar diperoleh dengan memahami sifat permintaan individual. Permintaan individual ditetapkan oleh dua faktor:

1. Nilai yang dikaitkan dengan pemerolehan dan penggunaan barang atau jasa yang bersangkutan

2. Kemampuan untuk memperolehnya. Keduanya diperlukan untuk permintaan individual yang efektif.

Terdapat dua model dasar untuk permintaan individual, yaitu :

1. Teori perilaku konsumen

Berkaitan dengan permintaan langsung untuk produk-produk konsumsi pribadi. Model ini sesuai untuk menganalisis permintaan individual atas barang dan jasa yang secara langsung memuaskan keinginan konsumen. Dalam model ini, nilai suatu barang atau jasa, atau utilitasnya adalah faktor penentu utama dari permintaan individual. Para individu dipandang berusaha untuk memaksimalkan utilitas total atau kepuasan yang diberikan oleh barang dan jasa yang mereka peroleh dan konsumsi. Proses optimisasi ini mengharuskan para konsumen untuk mempertimbangkan *utilitas marginal* (keuntungan berupa kepuasan) dalam memperoleh unit-unit tambahan satu produk tertentu atau dalam memperoleh unit-unit tambahan satu produk tertentu atau dalam memperoleh satu produk dibandingkan produk lainnya. Karakteristik produk, preferensi (selera) individual dan kemampuan untuk membayar adalah faktor-faktor penentu yang penting dari permintaan langsung.

2. Barang-barang dan jasa lainnya.

Barang-barang dan jasa lainnya diperoleh bukan karena nilai konsumsi langsung mereka, melainkan karena merupakan masukan

penting dalam pembuatan atau distribusi produk. Barang dan jasa yang diminta bukan untuk konsumsi pribadi akhir secara langsung tetapi untuk penggunaan mereka dalam menyediakan barang dan jasa lain. Kita mengatakan bahwa permintaan mereka diturunkan dari permintaan akan produk dimana mereka dipergunakan dalam pembuatannya. Jadi, permintaan untuk semua masukan yang dipergunakan oleh sebuah perusahaan adalah permintaan turunan. Dengan kata lain, permintaan turunan adalah permintaan untuk masukan yang dipergunakan dalam produksi.

Berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, maka barang-barang kebutuhan yang dimaksud disini merupakan konsumsi langsung bagi konsumen (mahasiswa, dosen dan karyawan) seperti tempat tinggal, makan, penggandaan dan percetakan, dan lain-lain. Namun apabila dikaitkan kembali dengan produk jasa akhir jasa pendidikan berupa ilmu pengetahuan, maka dapat dikategorikan sebagai barang konsumsi tidak langsung adalah jasa kursus pendukung lainnya serta barang-barang berupa buku-buku referensi pendidikan.

#### **A.c.4 Sektor Kegiatan Pendidikan dalam Pandangan Teori Lokasi**

Dalam pandangan teori ekonomi wilayah suatu institusi pendidikan dikategorikan sebagai salah satu aktivitas ekonomi sektor jasa yang memiliki kontribusi terhadap penyediaan tenaga

kerja terdidik sebagai produknya dan juga sekaligus sebagai pasar potensial bagi kegiatan ekonomi lainnya apabila suatu institusi pendidikan memiliki jumlah populasi yang cukup besar.

Dalam pandangan teori pendekatan pasar, Palender dalam John (2010) menyatakan bahwa barang dan jasa dapat diproduksi berdasarkan pertimbangan batas penduduk minimal dan jangkauan pasar. Batas minimal penduduk adalah penduduk minimum yang dibutuhkan untuk kelancaran dan kesinambungan penawaran barang. Kalau jumlahnya di bawah jumlah tertentu maka pelayanan akan mahal dan kurang efisien, jika meningkat di atas jumlah standar pelayanan akan menjadi kurang baik dan kurang efektif. Sedangkan jangkauan pasar (*range*) adalah jarak yang diperlukan seseorang untuk mendapatkan jasa yang bersangkutan. Lebih jauh lagi dari jarak standar yang ditentukan maka orang akan mencari wilayah lain yang lokasinya lebih dekat untuk memenuhi kebutuhan akan jasa yang sama. Dalam konteks penelitian ini maka batas penduduk minimal adalah jumlah seluruh populasi kampus UMY (Mahasiswa/i, karyawan dan dosen) sebagai pasar yang menyerap produksi kegiatan usaha di sekitarnya. Sedangkan jangkauan pasar merupakan jarak antara kampus UMY dengan lokasi kegiatan usaha.

Keberadaan Institusi Pendidikan dilihat dari sisi permintaan (pasar) yang dianggap sebagai suatu pasar. Lokasi penjualan sangat

berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya. Makin jauh dari pasar maka konsumen makin enggan membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjualan (pasar) semakin mahal. Produsen harus memilih lokasi yang menghasilkan penjualan terbesar yang identik dengan penerimaan terbesar.

Institusi pendidikan adalah pasar, dengan keberadaan Institusi pendidikan maka wilayah sekitarnya merupakan lokasi produksi dimana mahasiswa datang ke “pasar” untuk memenuhi kebutuhannya akan makan minum, tempat tinggal sementara (tempat kost), foto copy, warnet, wartel untuk membeli segala kebutuhan kuliahnya dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, masyarakat membuka usaha di sekitar Institusi pendidikan agar mahasiswa dapat lebih mudah mendapatkan segala kebutuhannya, aksesibility mudah, lebih efektif dan efisien. Sehingga menimbulkan *multiplier effect* terhadap lingkungan sekitarnya.

Konsep *multiplier effect* didasarkan pada perputaran uang dan pendapatan dalam suatu sistem kota atau daerah. Uang mengalir dari suatu kota sebagai pengembalian dari penjualan. Pada waktu yang sama, uang mengalir ke luar kota misalnya sebagai upah buruh dari luar daerah. Perputaran uang ini berhubungan dengan pembelian barang dan jasa dari daerah lain

yang erat kaitannya dengan aktivitas sektor ekonomi tertentu. Efek *multiplier* tidak dengan sendirinya terjadi secara terus menerus tanpa batas, tetapi semakin lama nilainya semakin kecil. Alasan ini ditunjukkan dengan adanya kebocoran dalam sistem ekonomi regional. Adanya uang yang mengalir keluar masuk wilayah dengan bebas, turut mempengaruhi besarnya kebocoran ini.

Terdapat tiga efek *multiplier* yang dihasilkan dalam suatu system perekonomian yaitu pengaruh langsung (*direct multiplier*), pengaruh tidak langsung (*indirect multiplier*) dan *total effect*. Yang dimaksud dengan pengaruh langsung yaitu pengaruh yang ditimbulkan terhadap suatu sektor secara langsung yaitu pengaruh kenaikan permintaan terhadap sektor itu sendiri. Pengaruh tidak langsung yaitu pengaruh yang ditimbulkan terhadap sektor lain akibat kenaikan permintaan di suatu sektor. Jumlah dari kedua pengaruh ini dinamakan pengaruh total. Herawati (1993) dalam John (2010)

#### **A.c.5 Penggunaan Lahan Kegiatan Sektor Jasa Pendidikan**

Pola penggunaan lahan merupakan indikator masyarakat dan taraf kehidupannya. Misalnya, pola penggunaan lahan pada suatu daerah yang menunjukkan mayoritas kegiatan sektor jasa, menunjukkan taraf kehidupan masyarakatnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain yang pola penggunaan lahannya adalah pertanian.

Pola penggunaan lahan sejalan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Pada dasarnya ekonomi masyarakat yang berkembang dan kemudian beralih menjadi penyebab kebutuhan atas lahan dan kenaikan nilai lahan. Jadi, pola penggunaan lahan secara fisik yang dimaksud adalah peningkatan pemanfaatan, mutu dan penggunaan lahan untuk kepentingan penempatan suatu atau beberapa kegiatan fungsional sehingga dapat memenuhi kebutuhan kehidupan dan kegiatan usaha secara optimal ditinjau dari segi sosial ekonomi, sosial budaya, fisik dan secara hukum. Sehingga dari uraian tersebut menjadi jelas bahwa pola penggunaan lahan yang didominasi oleh fungsi pendidikan kemungkinan akan mempengaruhi aktivitas ekonomi disekitarnya.

Dalam membicarakan penggunaan lahan ada dua hal yang perlu dipertimbangkan yaitu

1. Penggunaan lahan yang sekarang (*actual*);
2. Penggunaan lahan potensial.

Penggunaan lahan sekarang pada dasarnya merupakan hasil dari berbagai faktor penyebab, sebagian besar berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Penggunaan lahan potensial tidak selalu sama dengan penggunaan lahan sekarang, bahkan sering berbeda dengan penggunaan lahan yang disesuaikan dengan kemampuannya.

Dalam kehidupan ekonomi, daya guna dan biaya adalah penting maka diadakan pengaturkan tempat yang ekonomis berhubungan dengan pendapatan masyarakat. Pola penggunaan lahan perkotaan dapat



diterangkan dalam teori jalur sepusat, teori sektor dan teori pusat lipat ganda dihubungkan dengan kehidupan ekonomis. Jayadinata (1999) dalam John (2010) merumuskan beberapa faktor yang menjadi penentu dalam pola penggunaan lahan yang salah satunya adalah faktor perilaku masyarakat (*social behavior*) yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan proses sosial yaitu : sentralisasi (terkumpulnya penduduk disebabkan oleh prasarana ekonomi) dan desentralisasi. Dan dalam konteks penelitian ini institusi pendidikan dapat menyebabkan sentralisasi atau pemusatan konsentrasi penduduk pada satu wilayah.

Di Indonesia, kebijakan pengaturan zona penggunaan lahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang diatur melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kota/kabupaten dimana salah satu nomenklatur zona peruntukannya adalah zona peruntukkan lahan untuk pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, fungsi peruntukkan lahan dalam RDTR tidak selalu dapat memenuhi sasaran pembangunan sebagaimana diharapkan. Karena adanya beberapa kendala antara lain :

1. RDTR disusun di atas bidang-bidang tanah yang telah digunakan dan dikuasai oleh masyarakat.
2. Rata-rata luas penguasaan dan kepemilikan tanah yang relatif sempit.
3. Kurangnya penyuluhan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tujuan, sasaran, manfaat dan pentingnya RDTR.

4. Belum adanya tindakan pengendalian yang efektif terhadap pelaksanaan RDTR.

Sebagai subsistem dari penataan ruang, maka tujuan dari penatagunaan tanah tersebut diatas dilakukan atas dasar pengaturan fungsi zona peruntukan dalam RDTR yang telah ditetapkan. Kebijakan peruntukkan lahan dalam RDTR merupakan arahan lokasi kegiatan pembangunan pada wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. Tujuan pengaturan dan penyelenggaraan penatagunaan tanah dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian ruang tersebut akan dapat tercapat apabila tersedia data dan informasi tentang penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta data zona peruntukkan lahan dalam RDTR yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengaturan guna lahan pendidikan merupakan bagian dari suatu sistem tata guna lahan perkotaan.

#### **A.d. Tenaga Kerja**

Jumlah atau besarnya penduduk umumnya dikaitkan dengan pertumbuhan *income per capita* suatu negara, yang secara kasar mencerminkan kemajuan perekonomian negara tersebut. Ada pendapat yang mengatakan bahwa jumlah penduduk yang besar adalah sangat menguntungkan bagi pembangunan ekonomi. Tetapi ada pula yang berpendapat lain yaitu bahwa justru penduduk yang jumlahnya sedikit yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi kearah yang lebih baik.

Menurut Swasono (1983) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah daya manusia untuk melakukan pekerjaan, pengertian umum tersebut sesuai dengan pengertian tenaga kerja yang dimuat dalam undang-undang pokok ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 1968, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Simanjuntak (1998), tenaga kerja (*man power*) mengandung dua pengertian yaitu:

1. Tenaga kerja adalah seseorang atau sekelompok orang yang mampu bekerja, mampu berarti dapat melaksanakan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Tenaga kerja adalah sebagai jasa yang diberikan dalam suatu produksi (*labour service*) dalam konteks ini tenaga kerja mencerminkan kualitas usaha barang yang diberikan seorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa.

Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan, melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Menurut Hansen dan Afrida (2002) dalam Edi (2014) mengajukan tiga penyebab terjadinya setengah pengangguran yaitu : kurangnya jam kerja, rendahnya pendapatan, ketidakcocokan jam kerja. Serta menurut Sethurahman dan Afrida (2002) dalam Edi (2014) dalam

surveynya di beberapa negara Asia mengenai lapangan kerja sector informal yaitu menggunakan teknologi produksi tradisional, memproses bahan mentah lokal, tidak ada akses dalam permodalan, tidak terjangkau oleh sistem perizinan dan perpajakan, bermodal kecil.

#### **A.e Pengembangan Wilayah**

Menurut John (2010) Pengembangan wilayah merupakan upaya pemerataan pembangunan dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertentu melalui berbagai kegiatan sektoral secara terpadu, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah itu secara efektif dan efisien serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Menurut Wibowo et. Al (1999) dalam John (2010) menyatakan bahwa pengembangan wilayah merupakan usaha mengembangkan dan meningkatkan hubungan saling ketergantungan dan interaksi antarsistem ekonomi (*economic system*), manusia atau masyarakat (*social system*) lingkungan hidup dan sumber daya alam (*ecosystem*). Kondisi ini dapat diterjemahkan ke dalam bentuk pembangunan ekonomi, sosial, politik, budaya maupun pertahanan keamanan yang seharusnya berada dalam konteks keseimbangan, keselarasan dan kesesuaian.

Menurut Sirojuzilam (2005) menyatakan bahwa pengembangan wilayah pada dasarnya merupakan peningkatan nilai manfaat wilayah bagi masyarakat suatu wilayah tertentu, mampu menampung lebih banyak penghuni, dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rata-rata

membalik, disamping menunjukkan lebih banyak sarana/prasarana, barang atau jasa yang tersedia dan kegiatan usaha-usaha masyarakat yang meningkat, baik dalam arti jenis, intensitas, pelayanan maupun kualitasnya.

Beberapa indikator yang dapat dipakai dalam mengidentifikasi perkembangan suatu wilayah menurut Hanafiah (1982) dalam John (2010) antara lain :

1. Jumlah penduduk
2. Pasar tradisional
3. Jumlah perusahaan kecil, usaha kecil dan warung lainnya
4. Persepsi penduduk dan peran sertanya
5. Tingkat kesejahteraan
6. Jumlah relatif pengusaha seperti pedagang, penjaga toko, dan lain-lain
7. Jumlah relatif sarana dan prasarana transportasi

Meskipun banyak konsep tentang wilayah akan tetapi pakar ekonomi regional sependapat bahwa tujuan pengembangan wilayah adalah pembangunan dalam wilayah itu sendiri untuk menjadi lebih baik di segala sektor yang meliputi sektor industri dan perdagangan, pertanian, pariwisata, jasa dan perkantoran serta sektor lainnya.

Pembangunan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak memperhatikan sekelilingnya. Artinya, pembangunan itu harus dapat mempertinggi produktivitas suatu wilayah. John (2010) menyimpulkan bahwa dalam pengembangan wilayah yang terpenting adalah

bagaimana memberdayakan potensi yang ada bagi kesejahteraan warga, sebagai akhir daripada pembangunan dan pengembangan tersebut.

Menurut John (2010) teori-teori pengembangan wilayah menganut berbagai azas atau dasar berdasarkan tujuan penerapan masing-masing teori. Berbagai paradigma teori pengembangan wilayah dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Teori yang memberikan penekanan kepada kemakmuran wilayah (*local prosperity*).
2. Teori yang menekankan pada sumberdaya lingkungan dan faktor alam yang dinilai dapat mempengaruhi keberlanjutan sistem kegiatan produksi di suatu daerah (*sustainable production activity*). Kelompok penganut teori ini sering disebut sangat peduli dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).
3. Teori yang memberikan penekanan kepada kelembagaan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, sehingga kajian teori ini terfokus pada *good government* yang bisa bertanggung jawab (*responsible*) dan berkinerja bagus.
4. Teori yang perhatiannya tertuju kepada kesejahteraan masyarakat yang tinggal di suatu lokasi (*people prosperity*).

Beragam paradigma teori pengembangan wilayah diatas, bukan saling bertentangan, namun dalam penggunaannya dapat

bersinergi. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengandung muatan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendaliannya. Konsep dasar penataan ruang wilayah dan kota dengan pendekatan pengembangan wilayah pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan memperhatikan *comparative advantage* di suatu wilayah, serta mengeliminir kesenjangan pembangunan dengan mengurangi kawasan-kawasan yang miskin, kumuh dan tertinggal.

Analisa pengembangan wilayah yang dilakukan di dalam penelitian ini dilihat dari aspek ekonomi dan aspek lokasinya. Di dalam aspek ekonomi terdapat unsur penjualan masyarakat sekitar (yaitu unit kegiatan usaha) dan di dalam aspek lokasi terdapat unsur keterkaitan antara keberadaan lokasi kegiatan jasa pendidikan dengan wilayah sekitarnya.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dibawah ini merupakan uraian beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan untuk kemudian dapat dianalisis dan dikritisi dilihat dari pokok permasalahan, teori dan metode sehingga dapat diketahui letak perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

Berikut hasil penelitian terdahulu yang dipandang relevan dengan penelitian adalah sebagai berikut :

1. John Ester Lase. 2010. *Dampak Keberadaan Kampus Universitas Sumatera Utara Terhadap Pendapatan Usaha Kecil dan Warung serta Pola Ruang di Wilayah Sekitarnya*. Medan: Fakultas Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara. Menggunakan *metode Pengujian Sampel Berpasangan (Paired sample T Test) analisis Deskriptif*. Dari hasil kesimpulan menyatakan bahwa keberadaan kampus USU berdampak positif pada peningkatan pendapatan usaha dan warung kecil disekitarnya, hal ini ditunjukkan oleh lebih tingginya tingkat pendapatan usaha kecil dan warung pada saat masa aktif perkuliahan dibandingkan dengan pada saat masa libur semester. Dan dikatakan bahwa dampak langsung dari keberadaan USU adalah banyaknya konsumen dari kalangan mahasiswa/i USU.
2. Nelly Susanti. 2013. *Dampak Keberadaan Kampus UNNES terhadap Kondisi Ekonomi dan Pendidikan Penduduk Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang (Tahun 2006-2010)*. Skripsi: Fakultas Geografi, Universitas Negeri Semarang. Menggunakan *metode deskriptif kuantitatif*. Dari hasil kesimpulan menyatakan bahwa keberadaan kampus UNNES memberikan dampak terhadap jenis pekerjaan baru dan tata nilai dalam kehidupan penduduk Kelurahan Sekaran dan keberadaan kampus UNNES meningkatkan motivasi



orang tua terhadap partisipasi anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan kontribusi secara efektif sebesar 27.1%.

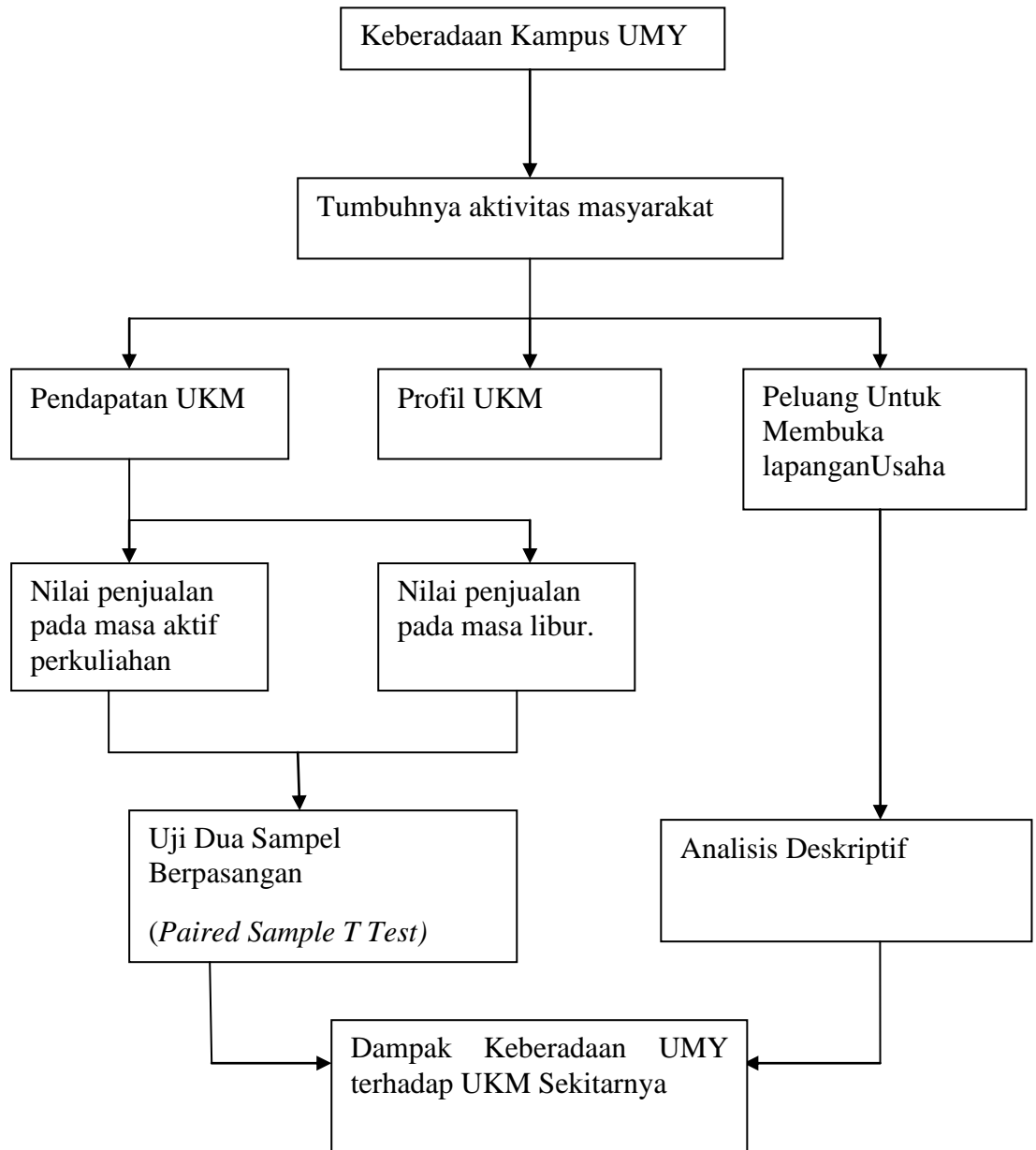
3. Nita Hindayani. 2015. *Analisis Modal Sosial Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pendukung Desa Wisata Candran*. Skripsi: Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menggunakan metode *Deskriptif Kualitatif*. Dari hasil kesimpulan menyatakan bahwa terdapat beberapa variable yaitu tipe modal sosial, kepercayaan yang terjalin pada UMKM, jaringan sosial dan norma. Hal ini mempengaruhi karena karakteristik atau adat istiadat di Desa Wisata Candran yang dimana ada jaringan yang terbentuk oleh sistematika perekrutan dimana hubungan kekerabatan menjadi latar belakang perekrutan. Terdapat pula tipe modal sosial atau karakteristik ikatan yang telah menjadi kebiasaan warga Desa Wisata Candran, kemudian tingkat kepercayaan di dalam Desa Wisata Candran juga dapat mempengaruhi tindakan-tindakan masyarakat sekitar dan norma yang dimiliki UMKM pendukung kegiatan Desa Wisata Candran juga hampir sama dengan norma sosial masyarakat Desa Wisata Candran.
  
4. Edi Rantau Sijabat. 2014. *Pengaruh Keberadaan PT. PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Talikumain terhadap Pengembangan Wilayah di Kabupaten Rokan Hulu (studi kasus: Desa Talikumain, kecamatan*

*Tambusai*). Jurnal: Universitas Sumatera Utara. Menggunakan metode analisis data yaitu mengetahui dampak pembangunan industry terhadap peningkatan pendapatan dan pengembangan wilayah di desa Talikumain dengan Uji Beda (Uji-t). kemudian, sampel dengan metode purposive. Dari hasil kesimpulan menyatakan bahwa dalam penelitian ini terdapat lima variable yang diukur yaitu pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, sumber bahan baku, kontribusi terhadap PEMDA, kepedulian terhadap masyarakat dan sikap masyarakat. Dinyatakan bahwa terdapat peningkatan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya pabrik PT. PMKS Talikumain, dengan adanya pabrik PT. PMKS juga dapat membantu masyarakat sekitar dengan menyerap tenaga kerja yang berjumlah 130 orang (70%) dari masyarakat sekitar, PT PKMS juga member kontribusi kepada PT PMKS berupa pembayaran pajak. Persepsi masyarakat dengan adanya PT. PMKS yaitu positif.

### **C. Hipotesis**

Aktivitas akademik kampus UMY dapat berpengaruh positif terhadap masyarakat sekitar karena dengan keberadaan kampus UMY maka masyarakat sekitar dapat menambah omset penjualan masyarakat disekitarnya. Dengan adanya aktivitas kampus UMY maka masyarakat dapat membuka peluang usaha yaitu dengan membuka warung-warung kecil, usaha makanan, percetakan dengan memperoleh hubungan timbal-balik pada mahasiswa/i, dosen maupun karyawan yang berada di kampus UMY.

#### D. Kerangka Pemikiran



**GAMBAR D.1**

*Flow Chart Penelitian*

## **E. Variabel dan Indikator Penelitian**

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 60).

Adapun variable penelitian ini adalah :

### **1. Variabel Bebas**

Variabel bebas adalah variable yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variable bebas dalam penelitian ini adalah Jumlah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2014.

### **2. Variabel Terikat**

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variable terikat dari penelitian ini adalah Usaha Kecil Menengah (UKM) di sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.